

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perbankan. Oleh David Rivaldi Haga Dida. NIM: 22310176. Manusia sebagai pelaku aktivitas perbankan tidak dapat dipisahkan dari sistem perbankan yang menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan terhadap aktivitas perbankan sangat diperlukan agar dapat berfungsi secara optimal dan aman. Namun, dalam praktiknya, tindak pidana perbankan sering terjadi yang dapat merugikan nasabah dan institusi perbankan. Masalah Penelitian dalam penulisan ini adalah: Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan?, Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan?, Mengapa Hakim peninjauan kembali menolak permohonan PK?. Tujuan Penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan Hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan. Untuk mengetahui alasan hakim mahkamah agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan. Alasan Hakim peninjauan kembali menolak permohonan PK. Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan dua variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat. Jenis sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen dan bahan Pustaka dan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah alasan hakim pengadilan negeri memutus bebas karena didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa hanya menjalankan tugas penerbitan SKBDN berdasarkan permintaan dan persetujuan nasabah, telah memberikan penjelasan mengenai risiko transaksi, tidak memperoleh keuntungan pribadi, serta kerugian yang timbul akibat tidak dikirimkannya barang oleh penjual merupakan tindak pidana lain yang berdiri sendiri. Majelis Hakim menilai tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan adanya kesengajaan maupun pelanggaran prosedur oleh terdakwa, sedangkan hakim mahkamah agung memutus pemidanaan karena didasarkan pada penilaian bahwa Pengadilan Negeri keliru menerapkan hukum. Mahkamah Agung menilai terdakwa melanggar ketentuan perbankan karena tidak menjelaskan risiko penggunaan SKBDN kepada nasabah serta melakukan kesalahan prosedural, termasuk penerbitan SKBDN tanpa kelengkapan dokumen dan persetujuan nasabah, yang berpotensi menimbulkan kerugian dan alasan Hakim peninjauan kembali menolak permohonan PK karena bukti baru berupa laporan audit internal tidak cukup kuat untuk menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, serta terbukti adanya kesengajaan terdakwa dalam tidak menjalankan prosedur sesuai regulasi yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: Penting sekali bagi bank untuk meningkatkan sistem pengawasan internal yang efektif agar dapat mencegah tindak pidana perbankan sejak awal, seperti kasus pencairan dana tanpa prosedur yang benar. Regulasi perlu diperbaiki dan penegakan hukum harus tegas serta konsisten supaya memberikan efek jera bagi pelaku, termasuk mereka yang mempermudah pencairan dana tanpa memenuhi persyaratan. Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan agar proses penyidikan dan penuntutan berjalan lancar dan efektif, sehingga kerugian besar bisa diusut tuntas. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pegawai bank tentang resiko tindak pidana perbankan sangat penting agar mereka lebih waspada dan bisa menjadi pengawas aktif. memanfaatkan teknologi informasi untuk memonitor transaksi secara real-time harus dioptimalkan agar aktivitas mencurigakan seperti pencairan dana tanpa barang dikirim dapat segera terdeteksi dan dicegah.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan

ABSTRACT

Description of Law Enforcement Against Perpetrators of Banking Crimes. By David Rivaldi Haga Dida. Student ID: 22310176. Humans as actors in banking activities cannot be separated from the banking system which is an important part in meeting financial needs. Therefore, management and supervision of banking activities are very necessary for it to function optimally and safely. However, in practice, banking crimes often occur which can harm customers and banking institutions. The research problems in this paper are: Why do District Court Judges acquit perpetrators who participate in banking crimes?, Why do Supreme Court Judges sentence perpetrators who participate in banking crimes?, Why do review judges reject PK applications?. The purpose of this research is to determine the reasons why the district court judge issued an acquittal verdict against the perpetrator who participated in banking crimes. To determine the reasons why the supreme court judge issued a criminal verdict against the perpetrator who participated in banking crimes. The reasons why the judicial review judge rejected the PK application. The research method in this writing is a normative research method using two variables, namely the independent variable and the dependent variable. The types of data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials with data collection techniques through documents and library materials and using descriptive-qualitative analysis. The research results obtained are the reason the district court judge acquitted because it was based on the consideration that the defendant only carried out the task of issuing SKBDN based on the request and approval of the customer, had provided an explanation regarding the transaction risks, did not obtain personal benefits, and the losses arising from the seller's failure to send goods were another independent crime. The panel of judges considered that there was insufficient evidence to prove the defendant's intent or violation of procedures, while the supreme court judge decided on the punishment because it was based on the assessment that the district court had applied the law incorrectly. The Supreme Court considered that the defendant violated banking regulations because he did not explain the risks of using SKBDN to customers and made procedural errors, including issuing SKBDN without complete documents and customer approval, which had the potential to cause losses and the reason the review judge rejected the PK application because new evidence in the form of an internal audit report was not strong enough to remove the unlawful nature of the defendant's actions, and it was proven that the defendant deliberately did not carry out procedures according to regulations which resulted in losses for the victim. The author's suggestions are: It is crucial for banks to improve their effective internal oversight systems to prevent banking crimes from the outset, such as cases of disbursement of funds without proper procedures. Regulations need to be improved and law enforcement must be firm and consistent to provide a deterrent effect for perpetrators, including those who facilitate disbursement of funds without meeting the requirements. Coordination between law enforcement agencies must be improved so that the investigation and prosecution process runs smoothly and effectively, so that large losses can be thoroughly investigated. Conducting outreach and education to the public and bank employees about the risks of banking crimes is crucial so that they are more vigilant and can become active supervisors. Utilizing information technology to monitor transactions in real-time must be optimized so that suspicious activities such as disbursement of funds without goods being sent can be immediately detected and prevented.

Keywords: Banking Crimes